

**PENANGANAN DAMPAK COVID-19 DI KAWASAN  
PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA  
(PERSPEKTIF: *ECONOMY SECURITY*  
DAN *HEALTH SECURITY*)**

Oleh:

**DWITA SUCI ROCHIMA<sup>1\*</sup>**

NIM.E1111161006

Saherimiko<sup>2</sup>, Uly Nuzulian<sup>2</sup>

\*Email : [dwitasucir@student.untan.ac.id](mailto:dwitasucir@student.untan.ac.id)

Universitas Tanjungpura

1. Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas TanjungpuraPontianak.
2. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas TanjungpuraPontianak.

**ABSTRAK**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana penanganan dampak COVID-19 di Kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya perbatasan di Kabupaten Sanggau Entikong. Permasalahan di kawasan perbatasan memang cukup kompleks terlebih lagi dengan adanya pandemi COVID-19, bagaimana masyarakat merasakan dampak yang begitu besar terutama dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Maka dari itu kebijakan yang diambil pemerintah harus memiliki pandangan mengenai keamanan manusia yang berfokus kepada ekonomi dan kesehatan, karena saat ini seluruh masyarakat global merasakan ancaman bagi kehidupan mereka, seluruh masyarakat global memiliki potensi untuk terpapar COVID-19 dan ketidakberdayaan masyarakat mencukupi kebutuhan sehari-hari menjadi dampak besar yang akan berimbas ke berbagai bidang keamanan manusia lainnya. Dengan menggunakan konsep *economic Security* dan *health security* peneliti ingin menggambarkan bagaimana kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi dampak di kawasan perbatasan dapat membantu meminimalisir dampak yang timbul dari pandemi COVID-19. Kebijakan yang dikeluarkan berupa peraturan mengenai pembentukan Satgas COVID-19 ini sebagai langkah awal pemerintah dalam menangani dan menanggapi COVID-19 dalam bidang kesehatan sedangkan dalam bidang ekonomi pemerintah menerapkan undang-undang pemulihan ekonomi dengan memberikan berbagai bantuan pokok untuk keberlangsungan pencukupan ekonomi masyarakat. Dalam penerapan kebijakan ini sudah dijalankan

cukup baik meskipun ada beberapa bidang yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 seperti di kawasan perbatasan. Peneliti menyarankan untuk dapat memperhatikan mengenai kondisi psikologi masyarakat yang saat ini mengalami ketergunjangan akibat adanya COVID-19 yang menyebabkan perubahan kehidupan dan segi ekonomi pemerintah harus memiliki strategi kedepan yang dapat menstabilkan perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan. Metode penelitian kualitatif deskriptif sebagai metode yang digunakan peneliti ini dengan data berupa gambaran maupun kalimat atau kata-kata dalam menggambarkan permasalahan yang peneliti analisis.

**Kata Kunci: Penanganan Dampak. Pandemi COVID-19, Economy Security, Health Security.**



**HANDLING COVID-19 IN THE INDONESIA-MALAYSIA BORDER AREA  
(PERSPECTIVE: ECONOMIC SECURITY AND HEALTH SECURITY)**

**ABSTRACT**

*This research aims to observe how COVID-19 is handled in the Indonesia-Malaysia border area, especially the border in Sanggau Entikong Regency. The problem in the border area is indeed quite complex, especially with COVID-19 pandemic as the community feels such a big impact in the health and economy sectors. Therefore, the policies made by the government must have a view of human security focusing on the economy and health, because currently people globally feel a threat to their lives. People worldwide have the potential to be exposed to COVID-19 and the powerlessness of the community to meet their daily needs is a major impact that will affect various other fields of human security. By using the concept of economic security and health security, the researcher would like to describe how the policies that have been implemented by the government in handling the impacts in border areas to help minimize the impact arising from COVID-19 pandemic. The policy issued is in the form of a regulation regarding the formation of COVID-19 Task Force as the government's first step in handling and responding to COVID-19 in the health sector, while in the economic sector the government has implemented an economic recovery law by providing various basic assistances for the sustainability of the community economic sufficiency. These policies have been implemented quite well, although there are several areas that the government should pay more attention to in overcoming COVID-19, such as in border areas. The researcher suggests paying attention to the psychological condition of the people who are currently experiencing shock due to the presence of COVID-19 which has caused changes in life. For the economic side, the government must have a future strategy that can stabilize the economy of people in border areas. Descriptive qualitative research method was the method used by this researcher with data in the form of descriptions or sentences or words in describing the problems that the researcher analyzed.*

*Keywords: Impact Management, COVID-19 pandemic, Economy Security, Health Security.*



## A. PENDAHULUAN

Perbatasan negara merupakan batasan teritorial yang menjadi pemisah kedua wilayah negara dan juga menjadi batas teritorial kedaulatan negara. Perbatasan memiliki banyak permasalahan antara lain mengenai geopolitik dan social. Geopolitik terjadi ketika negara dapat mengamankan pertahanan wilayah dan masyarakat di perbatasan dari pihak tertentu, dan sebagai persoalan sosial ketika fokus perhatian kepada keamanan manusia dan lingkungan perbatasan (Yohanes, 2011. 16).

Setiap kawasan perbatasan memiliki keunikan dan masalahnya masing-masing, masalah perbatasan darat maupun lautan di suatu negara memiliki kepentingan untuk kedua negara yang berbatasan. Kawasan perbatasan memiliki potensi bagi kedua negara dari segi keuntungan maupun kerugian bagi kedua negara yang berbatasan tersebut. Peneliti akan membahas mengenai perbatasan Indonesia-Malaysia yang kita ketahui bahwa perbatasan kedua negara ini memiliki sejarah Panjang bagi negara Indonesia maupun Malaysia.

Perbatasan daratan antara Indonesia-Malaysia merupakan perbatasan yang cukup penting dalam negara Indonesia karena perbatasan negara Indonesia-Malaysia memiliki garis perbatasan yang cukup panjang dari darat hingga perairan yang dapat menjadi potensi baik bagi kedua negara yang saling bertetangga (Kompas, diakses melalui [www.kompas.com](http://www.kompas.com) pada 10 September 2020).

Awal mula perbatasan Indonesia-Malaysia bermula saat kedua negara melakukan menandatangani perjanjian yang dilakukan oleh negara penjajah kedua negara yaitu Belanda dan Inggris dengan menandatangani perjanjian pada Konvensi London dalam perjanjian ini memutuskan bahwa bageian selatan dikuasi oleh Hindia Belanda sedangkan barat dengan ukuran yang sudah ditetapkan sebagai daerah kuasa Inggris. Hingga (Kompas, diakses melalui [www.kompas.com](http://www.kompas.com) pada 10 September 2020).

Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sanggau memiliki letak geografi yang berdampingan langsung dengan Malaysia,

perbatasan ini dapat langsung ke pusat Kota Kuching yang menjadi daya Tarik dari perbatasan ini dengan Malaysia yang memiliki akses langsung ke kota. Kabupaten Sanggau secara geografis terletak di pulau Kalimantan dalam Provinsi Kalimantan Barat, luas daerah 12.857,70 Km<sup>2</sup>. Selain memiliki keistimewaan berbatasan langsung dengan negara Malaysia Kabupaten Sanggau juga menjadi salah satu kabupaten yang memiliki peran penting bagi transportasi karena Sanggau termasuk di beberapa jalur potensial seperti jalur lintas sektor Timur Kabupaten Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu, jalur Sungai Kapuas, jalur trans Kalimantan dan jalur trans Borneo.

Dengan panjangnya perbatasan antara Indonesia-Malaysia lebih khusus di kawasan Provinsi Kalimantan Barat, menimbulkan potensi yang besar terjadinya kriminalitas maupun potensi ketidakamanan masyarakat perbatasan, maka dari itu setiap negara maupun pihak terkait harus lebih meningkatkan keamanan di kawasan perbatasan tidak hanya

fokus terhadap keamanan teritorial tetapi keamanan manusia atau *human security*. Tidak dapat dipungkiri bahwa keamanan manusia di kawasan perbatasan menjadi isu yang cukup banyak dibahas dan diperbincangkan di forum nasional maupun internasional. Isu yang dibahas mengenai keamanan kemanusiaan meliputi keamanan ekonomi, keamanan kesehatan, keamanan politik, keamanan komunitas, keamanan pangan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi. Dimana ketujuh faktor ini merupakan faktor yang menentukan dalam keberlangsungan keamanan kehidupan masyarakat perbatasan.

Kerawanan di kawasan perbatasan Entikong dapat dilihat dari beberapa peristiwa yang terjadi, pertama mengenai keamanan teritorial dilansir oleh CNN Indonesia mengenai kondisi pagar perbatasan Indonesia dan Malaysia banyak mengalami kerusakan, dimana pagar pembatas tersebut diduga di jebol oleh para pelintas ilegal atau para penyelundup. Hal tersebut diketahui pada saat diadakan Patroli gabungan di sekitar Pos

Lintas batas Entikong (PLBN) (CNN, diakses melalui [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) pada 10 September 2020).

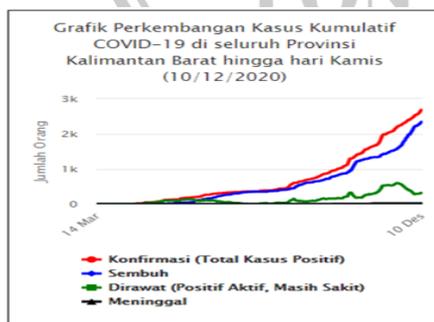
Kedua, mengenai *human trafficking* wilayah perbatasan Kalimantan Barat terutama di Kabupaten Sanggau menghadapi persoalan kejahatan *trafficking*. Selain *trafficking* atau perdagangan manusia secara ilegal di Kawasan perbatasan Sanggau juga memiliki beberapa persoalan seperti penyelundupan barang kebutuhan pokok hingga barang-barang yang memiliki efek yang negative bagi keamanan negara, seperti penyelundupan senjata dan narkoba.

Selanjutnya yang menjadi isu hangat di kawasan perbatasan adalah mengenai kesehatan yang kita ketahui bahwa masalah kesehatan merupakan masalah yang cukup penting terutama di kawasan perbatasan karena setiap individu memiliki hak untuk pelayanan kesehatan yang baik. Tahun 2020 sendiri merupakan tahun di mana masalah kesehatan menjadi isu yang sangat banyak di perbincangkan di dunia nasional maupun internasional,

tidak terkecuali kesehatan di kawasan perbatasan. Masalah kesehatan menjadi salah satu indikator dalam *human security* karena masalah kesehatan sangat mengancam keamanan manusia, saat ini kita mengetahui bahwa kesehatan dapat mengancam keselamatan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat, di kawasan perbatasan sendiri disinyalir masih belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai serta kesadaran masyarakat akan kesehatan belum terlalu tinggi yang mana dapat meningkatkan resiko penyakit yang ada.

Kawasan perbatasan Entikong, Sanggau sendiri sudah memiliki puskesmas yang di bangun sekitar tahun 2016, akan tetapi untuk penanganan masyarakat COVID-19 sumber daya manusia dan infrastruktur tidak memadai, terkadang masyarakat yang menderita penyakit cukup berat harus dilarikan ke kota Pontianak ataupun rumah sakit besar di wilayah yang dekat dengan perbatasan. Tidak terkadang juga masyarakat menjalani pengobatan di negara tetangga yang dimana tidak dipungkiri bahwa

fasilitas di rumah sakit tetangga lebih baik daripada di Kawasan Entikong. Begitu Pula dengan kasus COVID-19 yang memiliki gejala cukup berat akan dirujuk pada rumah sakit besar seperti di Sintang maupun rumah sakit daerah di Pontianak. Mengutip dari Tribun Sanggau bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Bupati Sanggau Paolus Hadi menyampaikan bahwa kasus pertama dari masyarakat Sanggau yaitu pasien PDP yang dirujuk di Rumah Sakit Sintang dipastikan positif COVID-19 dan ini menjadi fokus utama oleh pemerintah Sanggau maupun masyarakat setempat (Tribun, [pontianak.tribunnews.com](http://pontianak.tribunnews.com) pada 10 September 2020)



Sumber: AndraFarm.com

Gambar 1.1

Grafik di atas menunjukkan bahwa perkembangan kasus secara kumulatif di Kalimantan terus bergerak ke atas yang dimana ini menandakan bahwa banyaknya masyarakat Kalimantan Barat yang terpapar COVID-19 meskipun di wilayah kabupaten Sanggau atau perbatasan tidak memiliki banyak kasus aktif yang dapat dilihat pada gambar 2 tapi ini juga akan berefek ke seluruh wilayah Kalimantan Barat karena adanya mobilitas masyarakat yang tinggi di wilayah-wilayah regional Kalimantan Barat.

Gambar 1.2

No.	Kalimantan Barat Kota / Kabupaten Tanggal 10 Desember 2020	Kasus Positif Total (Terkonfirmasi)	Meninggal Total	Sembuh Total	Masih Sakit (Positif Aktif)
1	Kalimantan Barat	2.688	24 (A)	2.347 (A)	317 (A)
2	Kota Pontianak	857	28 (B)	2.326 (B)	334 (B)
3	Kab. Kubu Raya	434	21	569	276
4	Kab. Sintang	312	1	387	47
5	Kab. Landak	163	1	311	311
6	Kab. Ketapang	158	1	162	1
7	Kota Singkawang	154	1	158	1
8	Kab. Kapuas Hulu	112	1	153	1
9	Kab. Mempawah	102	1	110	1
10	Kab. Melawi	84	1	109	1
11	Kab. Sambas	74	2	81	1
12	Kab. Sanggau	71	2	71	1
13	Kab. Bengkayang	64	1	69	1
14	Kab. Kayong Utara	34	1	62	2
15	Kab. Sekadau	27	1	33	1
16	Luar Provinsi Kalbar	42	1	27	1
17	Belum di Verifikasi	-	-	42	1

Data kasus COVID-19 di Kalimantan Barat per 10 Desember 2020

Sumber: AndraFarm.com

Dampak yang timbul akibat pandemi COVID-19 cukup besar dalam segi keamanan manusia tidak

hanya dari segi kesehatan yang mengancam kesehatan hidup masyarakat sehari-hari tetapi juga menyebabkan efek domino kebebrapa sector kehidupan lain seperti ekonomi, politik dan lain sebagainya. Dampak yang terjadi karena COVID-19 selain kesehatan yaitu dampak ekonomi yang sangat terlihat jelas, perekonomian di Kawasan perbatasan memang sudah cukup mengalami penurunan semenjak dilakukan perdagangan bebas, akan tetapi ini diperparah dengan adanya COVID-19 dimana saat awal bulan Maret lebih tepatnya pada 18 Maret 2020 pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil kebijakan untuk meminimalkan kegiatan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia dengan menutup kegiatan keluar masuk di PLBN Entikong, terkecuali pemulangan Warga Negara Indonesia dari Sarawak, kebijakan ini di ambil setelah Negara Malaysia Kuching terlebih dahulu menutup perbatasannya secara total setelah adanya kasus Covid-19 terkomfrimasi di wilayahnya (Antarnews, diakses melalui

[www.kalbar.antaranews.com](http://www.kalbar.antaranews.com) pada 13 Desember 2020).

Masyarakat yang berada pada Kecamatan Entikong maupun kecamatan sekayam sangat merasakan dampak ini, karena penduduk perbatasan sebagian masih membutuhkan barang kebutuhan sembako dari pihak Malaysia, hal ini dikarenakan barang-barang dari Malaysia harganya relatif terjangkau oleh masyarakat perbatasan (Rica, wawancara, 17 Desember 2020). Selain itu juga pada pandemi COVID-19 pemerintah Malaysia tidak menerima tenaga kerja dari negara Indonesia,serta banyak PMI yang dipulangkan yang ini menambah buruk situasi ekonomi masyarakat. Terkadang masyarakat dapat mencukupi kehidupan sehari-hari dengan bekerja di kawasan perbatasan seperti menjadi tukang pikul barang di perbatasan, menjual kartu, penukaran uang dan lain sebagainya tapi hal ini tidak dapat dilakukan lagi semenjak pandemi COVID-19 karena kebijakan *lockdown* yang diberlakukan pemerintah Malaysia.

## **B.KAJIAN PUSTAKA**

## 1. Teori Keamanan Nasional

Isu Keamanan nasional telah diperbincangkan lebih dari 10 tahun yang lalu, akan tetapi hingga saat ini belumlah ada peraturan yang jelas mengenai keamanan nasional yang sesuai dengan harapan dan keadaan saat ini. Isu ini terbanyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sebagai penyebab isu keamanan nasional antara lain seperti globalisasi dan demokrasi yang ikut andil dalam pembentukan keamanan nasional. Menurut Barry Buzan sebagai ahli keamanan memiliki pemikiran mengenai sektor keamanan yang dimana ia membagi menjadi lima bidang sektor keamanan antara lain militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial, (Buzan, 1991).

Dalam memahami dinamika ancaman dan interaksi keamanan, hubungan antara sosial budaya dan agama dapat dipertimbangkan. Sistem pertahanan dapat menjamin menguatnya suatu Negara bangsa (nation state) dari “external threat” dan “domestic threat”.

Permasalahan keamanan ini merubah pandangan keamanan nasional dari negara yang menjadi pusat ke

keamanan manusia. Karena hal ini lah keamanan sekarang membutuhkan Kerjasama banyak aktor dalam pengaplikasiannya aktor yang ada juga harus bekerjasama dengan lembaga keamanan yang sudah da ini dilakukan untuk menjaga kewanaman nasional dari ancaman dalam maupun luar negara. Hal ini sejalan bahwa keamanan nasional suatu negara bergantung dari tiga faktor yaitu keamanan negara, keamanan masyarakat dan keamanan manusia. (Bambang, 2010:7-8 dan 17-18).

## 2. Konsep *Human Security*

Setiap manusia memiliki keinginan untuk hidup dalam keadaan tenang dalam segala aspek kehidupan sehari-hari, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ketenangan dalam kehidupan tidak dirasakan oleh setiap manusia di muka bumi khususnya pada saat pandemi COVID-19 melanda. Keamanan manusia muncul pada laporan pembangunan manusia pada tahun 1994 dalam sidang PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang diperjuangkan oleh Mahbub ul Hag (Rothschild 1995 dalam referensi

Chen 1994, 20). Pengertian dari keamanan manusia adalah untuk menghubungkan kebebasan dan keinginan dari rasa takut. Kata kebebasan dari rasa takut memiliki arti untuk menunjukkan kebebasan dari kekerasan, dan kata kebebasan dari keinginan menunjukkan keinginan kebebasan dari kemiskinan, karena setiap manusia tentu saja takut akan kemiskinan dan kemelaratan yang dimana tidak akan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan. Mereka juga menginginkan perdamaian politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Human security membuat individu sebagai pusat analisis. Oleh karena itu, human security mempertimbangkan keadaan yang dapat memberikan ancaman atau ketakutan bagi manusia itu sendiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Human security berdasarkan kepada banyak sektor tentang ketidakamanan. Karenanya, *human security* memerlukan pemahaman yang lebih luas tentang ancaman yang berkaitan dengan factor lain seperti politik, ekonomi, Kesehatan, pangan, pribadi dan

komunitas (United Nation Human Security Unit 2009, 6-7).

### 3. Konsep *Health Security*

Mempengaruhi keamanan manusia atau human security adalah faktor kesehatan, yang kita ketahui bahwa kesehatan menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia saat ini.

Keamanan merupakan keadaan terbebas dari berbagai bentuk ancaman, ketakutan dan bahaya. Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan jasmani, rohani, dan bersosialisasi dandapat menjamin kehidupan produktif bagi setiap orang hidup (Siti Nafsiah 2000, 91-92) Kesehatan harus terjaga untuk tercipta rohani yang baik dengan tubuh yang sehat. Pemeliharaan kesehatan menjadi pencegah terjadinya gangguan kesehatan yang akan memerlukan penanganan lebih seperti perawatan dan pengobatan (YLBHI dan PSHK 2006, 119). Keamanan kesehatan adalah kebebasan dari ancaman akan wabah penyakit yang menular. Menurut UNDP mengenai keamanan kesehatan mengatakan “manusia menjadi kelaparan bukan karena ketiadaan bahan makanan, melainkan

ketidakberdayaan manusia tersebut untuk memperoleh makanan”. Pada Laporan UNDP tahun 2005 mengatakan penyakit menular seperti HIV/AIDS penyebarannya terjadi begitu cepat saat perang sipil telah berakhir, hal ini dialami oleh Afrika, sub-Sahara, penyakit yang memiliki tingkat infeksi tinggi secara bertahap maupun langsung memiliki potensi yang tidak baik bagi setiap negara.

#### 4. Konsep *Economy Security*

Ekonomi menjadi bagian keamanan manusia, saat perang dingin selesai isu keamanan yang awalnya berpandang *high politic issues ke low politic issues* hal tersebut membuat setiap negara menghadapi perubahan yang berbeda dan menanggapi secara berbeda pula. Buzan mengatakan konsep keamanan mengalami perubahan dari keamanan tradisional ke keamanan non-tradisional *people-oriented* yang berfokus ekonomi, sosial dan lingkungan (Buzan, 1991:433).

Permasalahan dan isu keamanan sekarang tidak hanya persaingan kekuatan negara besar dunia, akan tetapi mengenai

kehidupan berbangsa negara, hal ini dikarenakan adanya globalisasi yang sangat cepat melanda dunia global, hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan teknologi dan informasi, serta integrasi dunia dalam berbagai bidang faktor vital negara. Faktor tersebut sebagai pemicu memunculkan masalah keamanan baru yang dapat langsung mempengaruhi keamanan nasional, yakni isu ancaman keamanan baru non tradisional (*nontraditional security issues*) terutama menyangkut keamanan manusia.

### C. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Peneulis menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian jurnal ini dimana penelitian ini mengeluarkan data berupa tulisan dan lisan dari objek yang diamati yaitu dalam bentuk data deskriptif (Moleong 2000, 3). Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia (Moleong 2000, 17). Tujuannya untuk melihat fenomena yang ada secara akurat.

## 2. Unit Analisis dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini lebih mengarah kepada hasil wawancara terhadap beberapa instansi yang terdampak dan menangani pandemi COVID-19 seperti Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Entikong dan BP2TKI sebagai data primer peneliti. Sedangkan objek penelitiannya adalah penanganan dampak COVID-19 di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia perspektif: *Economy security* dan *Health Security*.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai cara untuk mendapatkan data yang akan menjadi sumber penelitian peneliti, yaitu:

### 1. Wawancara

Kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak dengan yang satu memberikan pertanyaan dan yang lain memberikan jawaban dari pertanyaan dengan maksud tertentu ialah kegiatan wawancara.. Dalam wawancara ini peneliti melakukan beberapa tahapan yaitu mencari siapa yang akan diwawancara, melakukan

janji bersama narasumber, membuat pedoman wawancara, melakukan wawancara, pengambilan data dan mengolahnya, dan penarikan kesimpulan. Disini peneliti *smart phone* dan juga pedoman yang sudah di bikin peneliti (Sugiyono 2016, 135).

### 2. Dokumentasi

Sumber data untuk melengkapi penelitian, yang berbentuk sumber tertulis, film, gambar (foto) dan karya yang dapat memberikan informasi bagi penelitian (Sugiyono, 2011, 178). Dokumentasi menjadi salah satu cara peneliti untuk mengumpulkan data penelitian mengenai penanganan dampak COVID-19 di Kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, ini dilakukan agar penelitian lebih akurat, data dokumen yang peneliti ambil berupa buku, jurnal dan *website* yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya.

## 4. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan dari suatu data merupakan kewajiban bagi penelitian. Terutama dalam penelitian kualitatif, ini dilakukan untuk melihat hasil keyakinan dari penelitian yang di

teliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini untuk menciptakan validitas peneliti Teknik trigulasi menjadi pilihan peneliti. Teknik ini melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan sumber diluar data sebagai perbandingan data yang ada. akhirnya semua dialkukan pengecekan kembali agar data-data yang ada sesuai dan dapat di yakini dan di pertanggungjawabkan.

Dua triangulasi digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode, hal ini sesuai dengan saran Faisal yaitu menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode untuk melihata standar kredibilitas sebuah penelitian(Sugiyono 2011, 273-275).

#### **D.PEMBAHASAN DAN HASIL**

##### **1.Penanganan COVID-19 di PerbatasanEntikong-Serawak Bidang Kesehatan**

Penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pihak terkait seperti pemerintah provinsi, Kabupaten dan *stake holder* lainnya terlebih di Kawasan Perbatasan Entikong menggunakan berbagai strategi dalam meminimlisir dampak yang

terjadi kepada masyarakat teutama dalam bidang Kesehatan dan ekonomi. Kedua bidang inilah yang mendapatkan dampak yang sangat besar.

Dalam segi Kesehatan pasti semua masyarakat merasakan ketidakamanan dalam melaksanakan kegiatan sehari hari ini dikarenakan semua masyarakat di dunia sama-sama memiliki potensi untuk terpapar virus COVID-19. Penanganan yang dilakukan oleh pihak terkait antara lain yaitu pertama dari pemerintah pusat adanya keputusan presiden republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus diases 2019 (COVID-19) peraturan ini buat agar setiap daerah dapat mengenadalkan penyebaran COVID-19 di daerahnya masing-masing yang dimana itu sebagai tugas utama gugus tugas COVID-19. Selanjutnya peraturan ini digantikan dengan Peraturan Presiden No.82 tahun 2020 tentang komite panaganan Corona Virus Diases 2019 (COVID-19) dan pemulihan ekonomi Nasional dimana dengan adanya peraturan baru

diharapkan dapat meminimalisir dampak yang dirasakan oleh masyarakat terutama dalam bidang Kesehatan dan ekonomi. Peraturan ini akan di adaptasi dan dilaksanakan seluruh pemerintah provinsi di seluruh Indonesia.

Provinsi Kalimantan Barat sendiri membentuk Gugus Tugas yang di ketuai oleh Gubernur Kalimantan Barat Yaitu Sutarmidji yang dimana seluruh Bupati dan Walikota yang ada di wilayah Kalimantan Barat akan memberikan laporan mengenai COVID-19 di wilayahnya kepada Gubernur langsung sebagai ketua Satgas COVID-19, sedangkan di Kabupaten Sanggau diketuai oleh Bupati Sanggau Paolus Hadi. Gugus tugas ini berfungsi untuk meningkatkan dan mengendalikannya COVID-19 di Kawasan kerjanya masing-masing yang dimana bekerjasama dengan beberapa *stakeholder* lainnya. Kawasan perbatasan sendiri bekerjasama dengan beberapa instansi seperti dinas Kesehatan, PLBN, KKP, TNI/Polri dan masyarakat setempat.

Hal yang pertama dilakukan

oleh gugus tugas yaitu mensosialisasikan mengenai COVID-19 dan penerapan protokol Kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dan mendeteksi apakah ada masyarakat yang terpapar virus COVID-19 apabila ada yang terpapar maka akan dilakukan Tracking dan pengecekan Kesehatan berkala oleh Puskesmas bagi yang berkontak langsung dengan masyarakat yang terpapar. Selanjutnya di PLBN sebagai jalur masuk masyarakat menerapkan berbagai protokol Kesehatan untuk meminimalisir masyarakat yang masuk dengan membawa virus COVID-19, PLBN juga bekerjasama dengan KKP dalam pengecekan *Rapid test* bagi pelintas yang masuk. Peningkatan infrastruktur kesehatan juga dilakukan oleh pemerintah Sanggau dimana adanya penyiapan ruang isolasi atau karantina bagi masyarakat yang terpapar COVID-19 dan penyediaan kebutuhan medis. Bupati Sanggau juga mengeluarkan berbagai himbuan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol Kesehatan dalam kegiatan sehari-hari dan membatasi kegiatan di

luar rumah dengan banyak masyarakat.

## **2. Penanganan COVID-19 di Perbatasan Entikong-Serawak Bidang Ekonomi**

Dalam bidang ekonomi pemerintah memberikan beberapa bantuan seperti BLT (bantuan Langsung Tunai), subsidi listrik dan PDAM, bantuan Sembako dan bantuan sosial lainnya ini sesuai dengan Presiden No.82 tahun 2020 tentang penanganan Corona Virus Diales 2019 (COVID-19) dan pemulihan ekonomi Nasional yang dimana kebijakan mengenai pemulihan ekonomi berjalan sejajar dengan pemerintah pusat.

Dalam segi ekonomi ini masyarakat sedikit terbatu dengan kebijakan saat ini karena dengan adanya COVID-19 banyak masyarakat yang kehilangan mata pencariannya, ditambah dengan diberlakukannya penutupan bersekala besar oleh otoritas perbatasan Sarawak dimana tidak ada terjadinya kegiatan di Kawasan perbatasan yang dimana berpengaruh pada ekonomi perbatasan, yang dimana kita ketahui bahwa banyak masyarakat Entikong

bergantung kepada kegiatan litas batas dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Penguatan UMKM juga menjadi salah satu strategi bagi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kawasan perbatasan. TNI/Polri juga memberikan bantuan social dalam bentuk sembako untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat yang terdampak COVID-19.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu peristiwa terberat bagi masyarakat global tidak terkecuali masyarakat di Indonesia khususnya di Kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong dimana perubahan yang terjadi begitu cepat dalam kehidupan sehari-hari membuat terjadinya ketakutan dan kecemasan yang mendalam bagi masyarakat dimana tidak adanya rasa kamanan dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan ketidak mampuan mencukupi kebutuhan sehari-hari mnembaut keamanan Kesehatan dan keamanan ekonomi mereka terancam sebgai individu manusia.ketika tidak

dapat merasakan keamanan tersebut. Maka dari itu pemerintah pusat hingga daerah mengeluarkan beberapa strategi dalam menanggulangi dampak yang terjadi khususnya dalam segi Kesehatan dan ekonomi seperti penerapan protokol Kesehatan dan pemberian bantuan sembako dan subsidi di berbagai bidang agar masyarakat dapat meminimalisir dampak yang di timbulkan oleh pandemic COVID-19. Meskipun sudah dilaksanakan strategi tersebut akan tetapi COVID-19 masih tetap ada yang dimana sebaiknya pemerintah harus menyiapkan strategi lain agar dapat meminimalisir dampak kedepannya yang di perkirakan akan semakin membeberatkan masyarakat karena bantuan ekonomi hingga Kesehatan tidak akan berjalan selamanya.

## **2.Saran**

Dalam situasi pandemi COVID-19 yang terjadi begitu cepat membuat seluruh masyarakat global merasakan ketakutan dan ketidakberdayaan akan penerapan kebijakan yang berubah dari biasanya yang berskala nasional maupun internasional. Saran yang akan peneliti berikan untuk

mengambil dan pembentuk kebijakan dalam menanggulangi dampak COVID-19.

### **Bidang Kesehatan**

Pemerintah atau pengambil kebijakan harus lebih memperhatikan wilayah-wilayah yang cukup jauh dari pusat seperti perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong karena terkadang wilayah tersebut kurang merasakan bantuan-bantuan yang diberikan tetapi dampak yang dirasakan sama bahkan lebih terdampak. Dalam segi kesehatan dalam menghadapi COVID-19 tidak hanya imunitas atau fisik yang diperkuat tetapi melalui psikologi juga memiliki dampak penting maka dari itu pemerintah harus dapat mengendalikan dan menjaga kesehatan psikologis dari masyarakat saat pandemi COVID-19 terutama pengendalian informasi dalam bidang komunikasi elektronik. Penerapan protokol kesehatan yang harus dijaga ketat hingga keadaan dapat terkendali dan menemukan obat yang tepat untuk menanggulangi COVID-19. peningkatan infrastruktur kesehatan harus lebih diperhatikan karena

selama ini jika ada masyarakat yang memiliki penyakit parah harus ditransfer ke rumah sakit besar di luar Kabupaten Sanggau Penguatan penjagaan di kawasan perbatasan harus tetap ditingkatkan meskipun saat ini Sanggau masih memiliki angka rata-rata aman dalam penyebaran COVID-19 bukan berarti virus tersebut tidak, hal ini juga dapat diterapkan kepada masyarakat yang berasal dari dalam Kalimantan Barat jika ingin masuk ke kawasan perbatasan, Kota Pontianak dan kabupaten kota lainnya yang berada di sekitar Kabupaten Sanggau memiliki tingkat penularan yang cukup tinggi, ditakutkan terjadi transmisi lokal yang akan menimbulkan gejolak angka penularan.

#### **Bidang Ekonomi**

Penguatan ekonomi di perbatasan harus lebih mendapatkan perhatian lebih karena kedua faktor ini menjadi faktor penting menghadapi situasi COVID-19 saat ini. Karena ekonomi memiliki dampak yang besar selama pandemi terjadi, peningkatan UMKM masyarakat harus terus didorong untuk meningkatkan ekonomi

masyarakat. karena dengan pemberdayaan UMKM masyarakat akan menciptakan pekerjaan baru otomatis akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

#### **E. Daftar Pustaka**

##### **Buku dan Jurnal:**

- Buzan, Barry 1991. *People, States and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Buzan, Barry and Lenen Hansen. 2009. *The Evolution of International Security Studies*, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy.J. 2000 *Metode Penelitian Kualitatif*.

- Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rothschild, Emma. 1995. *What is Security?*. Daedalus.
- Sanak, Yohanes. 2011. Human Security dan Politik Perbatasan. Research Centre for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
- United Nations Human Security Unit. 2009. *Human Security in Theory and Practice*. New York.
- YLBHI dan PSHK. Panduan bantuan hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum. Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy.J. 2000 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: AlfabetaCet
- Website:**
- AndraFarm. 2020. Ini perkembangan seputar kasus virus korona (corona) di Provinsi Kalimantan Barat per kota / kabupaten hingga 10 Desember 2020. Diakses melalui [https://m.andrafarm.com/\\_andra.php?\\_i=daftar-co19-kota&noprovkot=12&corke=326&urut=2&asc=01100000000](https://m.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftar-co19-kota&noprovkot=12&corke=326&urut=2&asc=01100000000).
- CCN Indonesia. 2020. Peta Pesebaran Covid-19 Nasional Disiapkan, Pakai AI. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200327065310-185-487343/peta-pesebaran-covid-19-nasional-disiapkan-pakai-ai>.
- Kompas.com. 2020. 3 Negara yang Berbatasan Langsung dengan Daratan Indonesia. Diakses melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/120000469/3-negara-yang-berbatasan-langsung-dengan-daratan->

indonesia?page=all.

